

Research Article

Implementation of the Mobile Rebo Collaborative Service (LABOLING) at the Population and Civil Registration Service of Indramayu Regency

Meida

Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: meidam614@gmail.com

Ilham Setiawan

Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: setiawanilham294@gmail.com

Mulyati Kartini

Universitas Wiralodra Indramayu

E-mail: moelyatikartini@gmail.com

Copyright © 2025 by Authors, Published by Diplomasi: Jurnal Demokrasi, Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Received : August 22, 2025

Revised : September 17, 2025

Accepted : October 15, 2025

Available online : October 31, 2025

How to Cite: Meida, Ilham Setiawan, & Mulyati Kartini. (2025). Implementation of the Mobile Rebo Collaborative Service (LABOLING) at the Population and Civil Registration Service of Indramayu Regency. *Diplomasi : Jurnal Demokrasi, Pemerintahan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(4), 232–241. <https://doi.org/10.58355/dpl.v3i4.65>

Abstract

Problems in population administration services are still being experienced by residents in Indramayu Regency, especially those living in remote areas who find it difficult to access service offices. To address this challenge, the Department of Population and Civil Registration of Indramayu Regency initiated the Mobile Collaborative Wednesday Service (LABOLING) program as an innovative outreach approach to bring services closer to the community. This study aims to examine the implementation of the LABOLING program, the obstacles encountered, and the strategies used to overcome those obstacles. The research applies Richard Matland's public policy implementation theory, which consists of four main indicators: policy accuracy, implementer accuracy, target accuracy, and environmental accuracy. The research method used is descriptive qualitative, with data collected through interviews, observation, and documentation. The informants in this study include staff from the Department of Population and Civil Registration of Indramayu Regency and community members who received LABOLING services. The results show that the LABOLING program has significantly helped to expand the reach of population administration services.

Effectiveness of Budget Planning in the Regional Financial Management Information System Application Program

Meida, Ilham Setawan, Mulyati Kartini

However, several obstacles remain, such as limited infrastructure, technical issues in the document printing process, and uneven dissemination of the program across all areas. In conclusion, the LABOLING program is a fairly effective public service innovation and can continue to be developed through improvements in its implementations aspects.

Keywords: Implementation, LABOLING, Public Service Innovation, Population Administration.

Implementasi Layanan Kolaborasi Rebo Keliling (LABOLING) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu

Abstrak

Permasalahan dalam pelayanan administrasi kependudukan masih dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Indramayu, khususnya yang berada di daerah terpencil yang sulit menjangkau kantor pelayanan. Untuk menjawab tantangan tersebut tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu menginisiasi program Layanan Kolaborasi Rebo Keliling (LABOLING) sebagai bentuk inovasi jemput bola untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program LABOLING, hambatan-hambatan yang dihadapi, serta strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan public dari Richard Matland dengan empat metode indikator utama, yaitu: ketetapan kebijakan, ketetapan pelaksanaan, ketetapan target, dan ketetapan lingkungan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah staf Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu serta masyarakat penerima layanan LABOLING. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program LABOLING telah membantu memperluas jangkauan pelayanan administrasi kependudukan secara signifikan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala keterbatasan sarana dan prasarana, kendala teknis dalam proses pencetakan dokumen, serta belum meratanya sosialisasi program ke seluruh wilayah. Kesimpulannya, program LABOLING merupakan inovasi pelayanan public yang cukup efektif dan dapat terus dikembangkan dengan perbaikan-perbaikan pada aspek pelaksanaannya.

Kata Kunci: Implementasi, LABOLING, Inovasi Pelayanan Publik, Administrasi Kependudukan.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk pelayanan publik yang strategis adalah pelayanan administrasi kependudukan, yang memegang peran penting dalam menjamin hak-hak sipil warga negara, mulai dari hak atas identitas, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga berbagai program sosial. Administrasi kependudukan merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Keakuratan informasi kependudukan tidak hanya berperan dalam perencanaan pembangunan nasional, tetapi juga dalam pemenuhan hak-hak sipil setiap warga negara. Hal ini sejalan dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang menegaskan bahwa setiap penduduk berhak memperoleh dokumen kependudukan dengan pelayanan yang mudah, cepat dan gratis.

Kabupaten Indramayu di Provinsi Jawa Barat menghadapi tantangan dalam pemerataan layanan administrasi kependudukan, khususnya di wilayah pelosok dan perbatasan yang sulit dijangkau. Masyarakat di daerah tersebut kerap mengalami hambatan dalam mengurus dokumen, baik karena jarak, keterbatasan sarana, maupun minimnya informasi. Menjawab tantangan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Indramayu mengembangkan inovasi pelayanan publik bernama Layanan Kolaborasi Rebo Keliling (LABOLING), yang dilaksanakan setiap hari Rabu dengan

mengunjungi desa-desa secara bergilir, bekerja sama dengan pemerintah desa, kecamatan, dan instansi terkait lainnya untuk memberikan pelayanan langsung di lokasi.

Pelaksanaan Layanan Kolaborasi Rebo Keliling (LABOLING) memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Peraturan Bupati Indramayu Nomor 57 Tahun 2022 tentang Inovasi Daerah, yang mendorong terobosan pelayanan public untuk meningkatkan kualitas, pemerataan, dan efisiensi layanan. Program ini juga selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang pelayanan administrasi kependudukan secara daring, yang membuka peluang inovasi berbasis kolaborasi dan jemput bola untuk menjangkau masyarakat secara langsung.

Layanan Kolaborasi Rebo Keliling (LABOLING) menjadi wujud nyata upaya pemerataan layanan, karena mampu menjangkau masyarakat yang sebelumnya kesulitan mengakses kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Program ini tidak hanya mendekatkan layanan administrasi kependudukan, tetapi juga membangun kesadaran public akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan sah. Sejalan dengan literature pelayanan public, keberhasilan inovasi layanan tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat, koordinasi lintas lembaga, serta dukungan kebijakan yang memadai.

Oleh karena itu, penelitian ini memandang penting untuk mengkaji Implementasi Program Layanan Kolaborasi Rebo Keliling (LABOLING) secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, hingga identifikasi factor pendukung dan penghambatnya. Temuan penelitian ini diharapkan dapat membantu kontribusi bagi pemerataan akses, khususnya dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di wilayah pedesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2024), yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya terkait implementasi Program Layanan Kolaborasi Rebo Keliling (LABOLING) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap secara rinci proses perencanaan, pelaksanaan, serta factor pendukung dan penghambat yang dihadapi, yang tidak dapat diukur dengan data kuantitatif semata, namun dapat dianalisis melalui pemahaman terhadap pengalaman, pandangan, dan interaksi para pihak terkait.

Sumber data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, dan observasi langsung juga dilakukan selama kegiatan berlangsung untuk menangkap realitas pelaksanaan layanan secara factual di lapangan. Sementara itu, data sekunder di peroleh dari dokumen resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), arsip program, laporan kegiatan, serta literature yang relevan dengan topic penelitian. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2024) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hal ini bertujuan dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas implementasi program LABOLING, mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul dalam pelaksanaannya, serta merumuskan rekomendasi yang tepat guna bagi pengembangan

layanan administrasi kependudukan yang lebih merata, inovatif, dan berkelanjutan, terutama di wilayah pedesaan Kabupaten Indramayu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran vital dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan peristiwa penting. Lahir dari penataan kelembagaan pascareformasi birokrasi daerah, Disdukcapil dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja. Sejak awal berdirinya, instansi ini diamanahkan untuk menjamin hak sipil seluruh warga melalui penyediaan dokumen kependudukan yang akurat, cepat, dan gratis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Dalam perjalanannya, Disdukcapil Indramayu terus beradaptasi dengan perkembangan zaman dan teknologi. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) menjadi tonggak penting yang memungkinkan pelayanan lebih efektif dan data kependudukan terintegrasi secara nasional. Tidak berhenti di sana, instansi ini juga melahirkan inovasi strategis seperti Layanan Kolaborasi Rebo Keliling (LABOLING), sebuah program jemput bola yang menyasar masyarakat di pelosok desa setiap hari Rabu, bekerja sama dengan pemerintah desa, kecamatan, dan instansi terkait. Inovasi ini terbukti mampu mengatasi hambatan geografis sekaligus meningkatkan kesadaran warga akan pentingnya dokumen kependudukan.

Peran Disdukcapil tidak hanya sebatas penerbit dokumen, tetapi juga sebagai penjaga keakuratan data kependudukan yang menjadi dasar perencanaan pembangunan, distribusi bantuan sosial, hingga kebijakan publik lainnya. Dengan motto "CEKATAN" (Cepat, Akurat, Tepat, dan Sopan), Disdukcapil Indramayu terus membangun pelayanan publik yang profesional, inklusif, dan berkeadilan, sehingga keberadaannya menjadi salah satu pilar penting dalam mewujudkan tertib administrasi dan masyarakat yang bermartabat.

Profil Layanan Kolaborasi Rebo Keliling (LABOLING)

Layanan Kolaborasi Rebo Keliling (LABOLING) merupakan salah satu program inovasi unggulan yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Indramayu sebagai upaya mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat secara langsung, mudah, cepat, dan tanpa biaya. Program ini merupakan kolaborasi sinergis antara beberapa dinas penting di Kabupaten Indramayu, yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (Diskopdagin), serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Dengan pendekatan jemput bola ini, layanan publik yang sebelumnya hanya dapat diakses di kantor pemerintah kini dapat diperoleh langsung di tingkat kecamatan dan desa.

Dalam pelaksanaannya, Disdukcapil menyediakan berbagai layanan administrasi kependudukan seperti pembuatan dan pengurusan Kartu Keluarga (KK), perekaman dan

Effectiveness of Budget Planning in the Regional Financial Management Information System Application Program

Meida, Ilham Setawan, Mulyati Kartini

pencetakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran, akta kematian, serta aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Selain itu, DPMPSTP memberikan layanan penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB), Dinas Kesehatan menyediakan pelayanan medis dan izin pangan industri rumah tangga, Diskopdagin melayani sertifikat halal, sedangkan DPMD mengelola layanan Lebu Digital. Keberagaman layanan ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik yang komprehensif dan terintegrasi.

Pelaksanaan program LABOLING dilakukan setiap hari Rabu pada pukul 08.00 hingga 12.00 WIB dengan sistem penjadwalan yang diawali dari pengajuan resmi oleh pihak kecamatan. Pengajuan tersebut berisi permohonan pelaksanaan layanan di wilayahnya dengan alasan dan kebutuhan masyarakat setempat. Setelah diverifikasi dan dikoordinasikan dengan dinas terkait, Disdukcapil dan tim kolaborasi menetapkan jadwal pelaksanaan yang disesuaikan dengan kesiapan lokasi dan sumber daya. Mekanisme pelayanan di lapangan berjalan secara terorganisir, dimulai dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai jadwal dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi. Pada hari pelaksanaan, petugas melakukan verifikasi data, perekaman biometrik bila diperlukan, dan penginputan data kependudukan. Dokumen kependudukan dicetak dan diserahkan langsung ke masyarakat apabila memungkinkan, sementara proses yang belum selesai dilanjutkan di kantor Disdukcapil dengan pengambilan dokumen melalui pemerintah desa atau langsung oleh pemohon.

Respons masyarakat terhadap program ini sangat positif, terutama bagi warga yang selama ini mengalami kesulitan mengakses layanan administrasi kependudukan dan dokumen lainnya karena jarak dan keterbatasan transportasi. Petugas layanan dinilai ramah dan profesional, sehingga masyarakat merasa terbantu dan puas dengan pelayanan yang diberikan. Namun, beberapa kendala masih ditemui, seperti waktu tunggu yang relatif lama akibat antrean yang panjang serta keterbatasan frekuensi pelaksanaan yang menyebabkan sebagian warga berharap program ini dapat diperluas cakupannya dan dilaksanakan lebih sering.

Selain itu, tingkat sosialisasi mengenai LABOLING masih perlu ditingkatkan agar informasi dapat tersebar lebih merata dan tidak hanya melalui mulut ke mulut. Dengan perbaikan dalam hal efisiensi layanan dan perluasan jangkauan, program LABOLING diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan dalam mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, cepat, dan akuntabel di Kabupaten Indramayu. Secara keseluruhan, LABOLING tidak hanya mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen penting yang menjadi persyaratan untuk berbagai kebutuhan administrasi, pendidikan, kesehatan, hingga perbankan, tetapi juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam melakukan inovasi layanan publik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan

Impelentasi Layanan Kolaborasi Rebo Keliling (LABOLING) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu

Dalam pelaksanaan program Layanan Kolaborasi Rebo Keliling (LABOLING), kebijakan yang ditetapkan memiliki peran penting sebagai landasan utama agar tujuan pelayanan publik dapat tercapai secara optimal. Kebijakan tersebut tidak hanya menjadi

Effectiveness of Budget Planning in the Regional Financial Management Information System Application Program

Meida, Ilham Setawan, Mulyati Kartini

pedoman bagi pelaksana, tetapi juga dirancang untuk menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait akses terhadap layanan administrasi kependudukan. Dimensi ketetapan kebijakan dalam implementasi Program Layanan Kolaborasi Rebo Keliling (LABOLING) di Kabupaten Indramayu menunjukkan bahwa kebijakan ini lahir sebagai respons terhadap kebutuhan nyata masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan.

Program ini dirancang untuk memecahkan persoalan akses, jarak, dan keterbatasan pemahaman masyarakat, sejalan dengan arahan kebijakan nasional yang menekankan pemerataan layanan dan inovasi melalui sistem jemput bola. Perumusan kebijakan dilakukan melalui identifikasi permasalahan di lapangan, analisis hambatan geografis dan sosial-ekonomi, serta pelaporan kegiatan sebagai dasar evaluasi dan penyesuaian layanan. Layanan Kolaborasi Rebo Keliling (LABOLING) terbukti memberikan kemudahan nyata, terutama bagi warga pedesaan, dengan menyediakan pelayanan lengkap mulai dari pendaftaran hingga pencetakan dokumen di lokasi. Keselarasan program ini dengan misi kelembagaan Disdukcapil terlihat dari komitmen memberikan layanan publik yang cepat, tuntas, dan inklusif, meskipun masih terdapat kendala teknis seperti keterbatasan alat dan jaringan internet. Secara keseluruhan, kebijakan Layanan Kolaborasi Rebo Keliling (LABOLING) dinilai tepat sasaran, mampu mengurangi hambatan administrasi, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah.

Pelaksanaan Layanan Kolaborasi Rebo Keliling (LABOLING) menunjukkan sinergi yang cukup baik antara lembaga pemerintah, perangkat desa, dan masyarakat, meskipun kemitraan dengan pihak swasta belum terwujud. Disdukcapil sebagai pelaksana utama berhasil menghadirkan layanan administrasi kependudukan secara langsung, tuntas, dan terintegrasi dengan dukungan lintas dinas. Kolaborasi dengan perangkat desa menjadi kunci mobilisasi masyarakat dan kelancaran proses pelayanan, sementara komunikasi yang efektif memperkuat koordinasi di lapangan. Kendati demikian, keterlibatan pihak swasta masih menjadi peluang yang belum dimanfaatkan, padahal dapat membantu memperbaiki sarana prasarana serta memperluas jangkauan program. Dengan penguatan kolaborasi lintas sektor, khususnya melalui kemitraan strategis, efektivitas dan keberlanjutan Layanan Kolaborasi Rebo Keliling (LABOLING) dapat semakin optimal.

Ketepatan target dalam konteks implementasi kebijakan merujuk pada sejauh mana sasaran atau kelompok penerima manfaat yang dituju oleh kebijakan telah sesuai dengan perencanaan awal. Ketepatan target menjadi penting karena keberhasilan program tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh pihak yang memang menjadi prioritas. Dalam hal ini, penentuan target harus mempertimbangkan kriteria yang jelas, seperti lokasi, kondisi sosial-ekonomi, dan kebutuhan masyarakat. Apabila target penerima tidak tepat sasaran, program berisiko mengalami pemborosan sumber daya, menurunnya efektivitas, dan tidak tercapainya tujuan kebijakan. Oleh karena itu, indikator ini digunakan untuk menilai apakah implementasi kebijakan telah mampu menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan, sehingga kebijakan dapat memberikan dampak maksimal sesuai tujuan yang telah dirumuskan.

Lingkungan dalam implementasi kebijakan mengacu pada sejauh mana kondisi lingkungan, baik internal maupun eksternal, mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Lingkungan internal meliputi dukungan regulasi, kesiapan organisasi pelaksana, ketersediaan sumber daya, koordinasi antarbagian, serta komitmen pimpinan dan staf. Lingkungan eksternal mencakup dukungan aktor di luar lembaga, seperti pemerintah desa, tokoh masyarakat, kondisi sosial-budaya, karakteristik geografis, dan infrastruktur wilayah. Lingkungan yang kondusif akan memperlancar proses implementasi, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung dapat menimbulkan hambatan, mulai dari rendahnya partisipasi masyarakat hingga keterbatasan teknis di lapangan. Dengan demikian, indikator ini digunakan untuk menilai apakah kebijakan dijalankan dalam ekosistem yang mendukung secara menyeluruh, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.

Faktor Penghambat dalam Implementasi Layanan Kolaborasi Rebo Keliling (LABOLING) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu

Pelaksanaan program Layanan Kolaborasi Rebo Keliling (LABOLING) di Kabupaten Indramayu mengalami beberapa kendala yang menjadi penghambat efektivitas layanan. Hambatan utama meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, khususnya perangkat keras yang sudah usang sehingga mengganggu proses pencetakan dokumen. Selain itu, waktu pelayanan yang tidak selalu tuntas dalam satu hari menyebabkan masyarakat harus menunggu atau datang kembali, sehingga mengurangi efisiensi layanan. Faktor ketiga berasal dari kesiapan sumber daya manusia masyarakat, dimana banyak warga yang belum memahami persyaratan dan prosedur layanan sehingga perlu edukasi dan sosialisasi lebih intensif. Untuk mengatasi kendala tersebut, perlu dilakukan peningkatan kualitas sarana prasarana, pelatihan bagi petugas, serta penguatan edukasi kepada masyarakat agar program LABOLING dapat berjalan lebih optimal dan memberikan pelayanan yang lebih cepat, akurat, dan efektif di masa mendatang.

Faktor Pendukung dalam Implementasi Layanan Kolaborasi Rebo Keliling (LABOLING) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu

Pelaksanaan program LABOLING di Kabupaten Indramayu didukung oleh beberapa faktor utama. Pertama, adanya dukungan penuh dari internal Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, khususnya kesiapan tim pelaksana yang mampu menjalankan proses pelayanan di lapangan dengan baik. Kedua, koordinasi yang baik antara instansi pemerintah dan perangkat desa memudahkan proses administrasi dan mempercepat pelayanan di lokasi. Ketiga, semangat kerja tim yang solid serta dukungan pimpinan membantu mengatasi keterbatasan alat dan sumber daya manusia. Keempat, partisipasi aktif masyarakat yang membutuhkan layanan langsung di desa turut mendorong keberhasilan program.

Secara keseluruhan, sinergi antara perangkat daerah, tim pelaksana, perangkat desa, dan masyarakat menjadi kunci kelancaran LABOLING. Untuk peningkatan ke depan, Disdukcapil perlu melakukan pelatihan teknis, menambah sumber daya manusia, dan

memperbarui peralatan agar layanan semakin optimal dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Upaya Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Layanan Kolaborasi Rebo Keliling (LABOLING) Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program LABOLING. Salah satu upaya penting adalah peningkatan intensitas sosialisasi kepada masyarakat melalui perangkat desa, media sosial, dan komunikasi daring agar warga lebih memahami persyaratan dan prosedur layanan sehingga mengurangi ketidaksiapan saat pelayanan. Selain itu, kapasitas aparatur juga diperkuat dengan arahan teknis sebelum pelaksanaan, meskipun pelatihan formal belum rutin dilakukan. Dokumentasi dan pelaporan kegiatan dilakukan secara rinci sebagai bahan evaluasi untuk menyesuaikan program dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal sarana prasarana, Disdukcapil berupaya memperbarui perangkat teknologi agar pencetakan dokumen dapat dilakukan langsung di lokasi, mengurangi keterlambatan layanan. Permasalahan lain adalah sistem pelaksanaan LABOLING yang masih bersifat reaktif, tergantung surat permohonan dari kecamatan atau desa, sehingga beberapa wilayah kurang terjangkau.

Sebagai solusi, Disdukcapil perlu mengadopsi pendekatan proaktif dengan pemetaan wilayah berdasarkan data kependudukan untuk menjangkau daerah yang belum terlayani secara optimal. Harapan masyarakat agar layanan diperluas dan lebih sering diadakan juga menjadi pendorong bagi perbaikan perencanaan wilayah dan pendekatan sosial. Secara keseluruhan, upaya perbaikan yang telah dilakukan menunjukkan perkembangan positif. Namun, peningkatan pelayanan secara menyeluruh dan merata memerlukan strategi yang lebih proaktif dan berbasis data agar LABOLING dapat menjadi layanan publik yang inklusif, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Implementasi Layanan Kolaborasi Rebo Keliling (LABOLING) di Kabupaten Indramayu telah menunjukkan efektivitas dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, khususnya bagi masyarakat di daerah terpencil. Program ini berhasil mempermudah dan mempercepat proses pelayanan sekaligus mengurangi beban antrean di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Meskipun demikian, terdapat kendala yang meliputi keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, jumlah petugas, serta kurang optimalnya sosialisasi yang berdampak pada partisipasi masyarakat yang belum merata. Upaya perbaikan yang dilakukan mencakup peningkatan intensitas sosialisasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan dokumentasi dan pelaporan, serta pembaruan sarana dan prasarana. Selain itu, penerapan pendekatan berbasis data sangat penting untuk memastikan cakupan wilayah pelayanan yang lebih merata dan proaktif.

Dalam tahap kedepannya pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan komitmen melalui penguatan regulasi dan penyediaan anggaran yang memadai guna menjamin keberlanjutan serta pengembangan LABOLING sebagai program prioritas

Effectiveness of Budget Planning in the Regional Financial Management Information System Application Program

Meida, Ilham Setawan, Mulyati Kartini

daerah. Perluasan sosialisasi melalui berbagai media komunikasi serta peningkatan sarana pendukung, seperti penambahan kendaraan layanan keliling dan penguatan infrastruktur jaringan internet, menjadi aspek strategis dalam mendukung kelancaran pelayanan. Lebih lanjut, sinergi dan kolaborasi lintas sektor dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan organisasi masyarakat sipil perlu terus diperkuat untuk mewujudkan layanan yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Sugiyono, Prof. Dr. 2024. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Wahab, S. A. 2011. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Garvera, R. Rindu, Kiki Endah, Otong Husni Taufik, dan Neti Sunarti. 2024. *Pelayanan Sektor Publik: New Public Management*. Ciamis: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Dwiyanto, Agus. 2021. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sipahutar, Hotnier. 2021. *Efektivitas Inovasi Kebijakan Pelayanan Publik di Indonesia*. Jakarta: Indocamp.
- Pratama, M. Rizki. 2025. *Proses Inovasi Pelayanan Publik: Inisiasi, Implementasi dan Difusi*. Jakarta: Minhaj Pustaka.
- Björkdahl, J., & Holmén, M. 2022. "Service Innovation in Manufacturing Firms: A Literature Review and Research Agenda." *Industrial Marketing Management*, 101, 31–44.
- Buchheim, C., Struwe, L., & Wenzel, M. 2020. "Public Sector Innovation: Adoption of New Practices and Technologies." *Public Administration Review*, 80(4), 567–580.
- Cinar, E., Trott, P., & Simms, C. 2022. "Understanding Public Sector Innovation: A Review and Future Research Agenda." *Government Information Quarterly*, 39(1), 101–120.
- Fauzan, A. 2024. "Model Implementasi Kebijakan Publik." *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(3), 17929–17938.
- Ismail, M., & Ismail, I. 2022. "Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Garut." *Jurnal Registratie*, 4(1), 22–31.
- Kerenhapukh, A. M., Saefulrahman, I., & Taryana, A. 2024. "Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima Melalui Layanan Rabu Petang Pada Unit" Pelayanan Administrasi Kependudukan (UPAK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022." *Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA)*, 4(2), 388–393.
- Lestari, R. A., & Santoso, S. A. 2024. "Pelayanan Publik dalam Good Governance." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)*, 2(1).
- Moenir. 2024. "Konsep Pelayanan Publik dalam Administrasi Negara." Dalam Lestari, R. A., & Santoso, S. A. (Eds.), *Pelayanan Publik dalam Good Governance*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Juispol)*, 2(1).

Effectiveness of Budget Planning in the Regional Financial Management Information System Application Program

Meida, Ilham Setawan, Mulyati Kartini

- Sazzad, M. M. R., Hassan, M. M., & Mahmud, A. 2021. "Policy Innovation in Public Administration: Challenges and Opportunities." *Policy & Politics*, 49(3), 479–497.
- Vincenzi, A. M., & da Cunha, J. A. 2021. "The Role of ICT in Economic Growth: A Service Sector Perspective." *Journal of Service Science and Management*, 14(3), 405–419.
- Wattimena, M., Susilo, Y., & Handayani, R. 2021. "Bureaucratic Transformation and Public Service Innovation in Indonesia." *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 105–120.
- Winahyu, R. A., & Meirinawati. 2024. "Pelayanan Prima Pada Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Melalui Website Plavon (Studi Kasus Di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo)." *Jurnal Intelektual Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 11(2), 120–128.